

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DI  
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

**(Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Nusa Ummat  
Sejahtera Semarang)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strara S.1  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun oleh :

**Bellia Sofiana Najwa**  
**1502036072**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Bellia Sofiana Najwa

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Bellia Sofiana Najwa  
NIM : 1502036072  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **"Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dewan Pengawas Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus Pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang)."**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Maret 2020

**Pembimbing I**

**H. Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum.**  
**NIP. 197110121997031002**

**Pembimbing II**

**Ahmad Munif, M. SI.**  
**NIP. 198603062015031006**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

---

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **BELLIA SOFIANA NAJWA**

NIM : 1502036072

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dewan Pengawas Syari'ah  
Di Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus Koprasi Simpan Pinjam  
Pembiayaan Syari'ah)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
Sekretaris/Penguji 2	: Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
Anggota/Penguji 3	: Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4	: Moh. Khasan, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,69 (tiga koma enam puluh sembilan / B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI** serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



ALI IMRON

SUPANGAT

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali Imran: 104)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua ku Bapak Drs. Shofi'i dan Ibu Nur Astuti yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dan do'a serta nasihat yang diberikan.
2. Adikku tercinta Muhammad Yanuuba Shofaarrifqi yang selalu mendukung dalam segala hal.
3. Teman-temanku terkasih dan tersayang (Rama, Ulvi, Rizki, Anya, Tiwi) yang selalu ada dan membantu dalam setiap kesempatan.
4. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuannya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali, informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Maret 2020

**Deklarator**

**Bellia Sofiana Najwa**  
**1502036072**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Śā'	<i>Ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>hā'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>khā</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Żal	<i>Ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Şād	<i>Ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-

م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Waw	<i>W</i>	-
هـ	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-



## ABSTRAK

Dewan Pengawas Syari'ah merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syari'ah serta bertugas mengawasi terhadap penerapan fatwa DSN-MUI di lembaga keuangan syari'ah tersebut. Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah diharapkan mampu mengawal dan mengawasi akad-akad yang ada di lembaga keuangan syari'ah, agar seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. KSPPS Nusa Ummat Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang telah memiliki Dewan Pengawas Syari'ah namun dalam praktiknya, kehadiran Dewan Pengawas Syari'ah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera belum optimal.

Oleh karena itu Dewan Pengawas Syari'ah dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Permasalahan dalam penelitian ini : (1) Bagaimana peran Dewan Pengawas Syari'ah terkait dengan fungsi pengawasan yang ada di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang?, (2) Bagaimana kesesuaian peran Dewan Pengawas Syari'ah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang menurut hukum islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan lokasi penelitian di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dan menggunakan keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 sebagai alat analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pertama, peran Dewan Pengawas Syari'ah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang masih belum optimal, Dewan Pengawas Syari'ah hanya sebagai pelengkap dalam struktur organisasi. Karena Dewan Pengawas Syari'ah disini secara struktural memang ada tetapi secara fungsional perannya belum optimal seperti anggota Dewan Pengawas Syari'ah tidak melakukan pengecekan atau review kembali setiap akad yang digunakan dan kurang aktif dalam pengawasan. Kedua, kesesuaian peran Dewan Pengawas Syari'ah menurut hukum islam yaitu keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi kegiatan operasional KSPPS.

**Kata Kunci:** (*Peran DPS, Lembaga Keuangan Syari'ah*)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah pengawas pada lembaga keuangan syari'ah yang mengacu pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), serta norma-norma yang menyangkut operasional pada lembaga keuangan syari'ah. Dewan pengawas Syari'ah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN-MUI.

Tugas utama dari Dewan Pengawas Syari'ah yaitu melakukan pengawasan pada lembaga keuangan syari'ah yang menyangkut kegiatan operasional lembaga tersebut agar sesuai dengan prinsip Islam. Serta memberi pengarahan agar kualitas sumber daya insani yang bekerja pada lembaga keuangan syari'ah tersebut, pengetahuan mengenai hukum Islam semakin meningkat.

Namun dalam kenyataannya masih terdapat kekuarangan yang terjadi di lapangan. Salah satunya terkait dengan kompetensi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

dan peran serta fungsinya kurang berjalan optimal. Selain itu, yang menjadi hal terpenting dalam fungsi pengawasan adalah independensi DPS pada lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya.

Skripsi ini disusun dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dewan Pengawas Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah** (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Nusa Ummat Sejahtera Semarang). Maksud dan tujuannya untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah apakah telah dijalankan dengan benar oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang memiliki wewenang menjadi pengawas pada lembaga keuangan syari'ah.

Skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dosen pembimbing I Bapak H. Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum
2. Dosen pembimbing II Bapak Ahmad Munif, M.SI.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
4. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.

6. Seluruh Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Nusa Ummat Sejahtera Semarang yang turut membantu selama proses penelitian berlangsung.
7. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Baik dari segi isi, penulisan, maupun analisis. Oleh karena itu diharapkan para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang dapat memberikan motivasi bagi penulis.

Akhirnya dengan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan dari para pihak yang telah membantu penulis dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 12 Maret 2020

**Penulis**

**Bellia Sofiana Najwa**  
**1502036072**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJAUN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

## **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15

## **BAB II : DEFINISI, LANDASAN HUKUM SERTA PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DAN HISBAH**

A. Koperasi Syari'ah.....	17
1. Pengertian Koperasi Syari'ah.....	17
2. Tujuan Koperasi Syari'ah.....	19
3. Peran dan Fungsi Koperasi Syari'ah.....	20
4. Prosedur Pendirian Koperasi Syari'ah.....	21
5. Landasan Hukum Koperasi Syari'ah.....	23
6. Macam-Macam Akad Dalam Koperasi Syari'ah.....	23
B. Dewan Pengawas Syari'ah.....	30
1. Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah.....	30
2. Landasan Hukum Dewan Pengawas Syari'ah.....	31
3. Tugas Dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah.....	32
4. Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000.....	33
C. Hisbah.....	35
1. Pengertian Hisbah.....	35
2. Mekanisme Pengawasab Dalam Hisbah.....	37
3. Hisbah Di Indonesia.....	40
4. Persamaan Dan Perbedaan Hisbah Dengan DPS.....	42

## **BAB III : PRAKTIK PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DI KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA**

A. Profil KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.....	44
1. Sejarah KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.....	44
2. Fungsi KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.....	48
3. Asas Dan Prinsip Dasar KSPPS Nusa Ummat Sejahtera....	48
4. Produk KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.....	49
5. Inovasi Layanan.....	54
B. Mekanisme Pengawasan DPS Pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.....	55

#### **BAB IV : ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DALAM PENGAWASAN DI KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA**

A. Analisis Peran DPS Dalam Pengawasan Di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.....	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran DPS Di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.....	70

#### **BAB V : PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu sistem keuangan negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga perekonomian dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dan kehidupan dimasyarakat.<sup>1</sup>

Perkembangan sistem keuangan syari'ah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syari'ah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syari'ah. Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang turut andil dalam perkembangan perekonomian berbasis syari'ah adalah lembaga keuangan mikro syari'ah, seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).<sup>2</sup>

Baitul Maal Wa Tamwil yang dalam peraturan sekarang ini telah berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syari'ah. Baitulmaal berfungsi sebagai pengumpulan dan penyaluran dana untuk

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 17

<sup>2</sup> Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm.5



kepentingan sosial, sedangkan Baitul Maal Wa Tamwil adalah lembaga yang bergerak dibidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.<sup>3</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera, adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syari'ah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syari'ah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera memiliki berbagai produk yang ditawarkan baik itu produk simpanan dan pembiayaan, sistem yang digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera adalah dengan sistem syari'ah (bagi hasil). Produk simpanan berupa tabungan, deposito (wadi'ah) serta produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif, meliputi pembiayaan *musyarakah* (kerjasama) dan *murabahah* (jual beli).<sup>4</sup>

Karakteristik yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) berbeda dengan koperasi konvensional. Karakteristik yang paling terlihat dalam lembaga keuangan syari'ah yaitu adanya penerapan akad-akad baik dalam bentuk tabungan ataupun pembiayaan. Selain itu, seluruh lembaga keuangan syari'ah juga harus

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Keadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 353

<sup>4</sup> Company Profile KSPPS NU Sejahtera

memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) baik itu lembaga keuangan makro syari'ah dan lembaga keuangan mikro syari'ah.

Agar lembaga keuangan syari'ah tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan, maka setiap lembaga keuangan syari'ah harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (DSN-MUI). Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tersebut. Dewan Pengawas Syari'ah diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) prinsip dan pelaksanaanya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Yaitu salah satunya setiap lembaga keuangan syari'ah diwajibkan memiliki anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang melakukan pengawasan secara periodik dan melaporkan kepada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) minimal dua kali dalam satu tahun, dimana Dewan

---

<sup>5</sup> Neneng Nur Hasanah, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 104

Pengawas Syari'ah (DPS) ini bertujuan untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

Begitu pula yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang, koperasi tersebut memiliki dua orang anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), tetapi fungsi dan peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) belum berjalan dengan baik, dikarenakan kesibukan dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) maka pengawasannya dilakukan melalui komunikasi via telepon dan kunjungan ke kantor koperasi syari'ah hanya beberapa kali dalam satu tahun. Selain itu kurangnya peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam pengawasan akad-akad dan kegiatan operasional lainnya terjadi karena belum optimalnya pengawasan secara periodik atas pemenuhan prinsip syari'ah terkait mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana.<sup>6</sup>

Dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) seharusnya pemenuhan atas prinsip syari'ah dapat berjalan dengan baik, namun yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang dalam praktiknya di lapangan masih ada ketidaksesuaian dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam kenyataannya, peraturan tersebut yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan HRD KSPPS Nusa Ummat Sejahtera

Syari'ah belum bisa diterapkan secara maksimal. Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sangatlah penting untuk kemaslahatan bagi masyarakat dan bagi lembaga keuangan syari'ah tersebut dalam hal ini khususnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS), oleh karena itu agar berjalan sesuai prinsip syari'ah maka perlu pengawasan yang aktif dan berkala serta selalu konsisten dalam penerapan prinsip syari'ah.

Peran Dewan Pengawas Syari'ah juga tidak terlepas dari operasionalnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) yaitu mengetahui dan memberikan pendapat pada produk yang akan di keluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) agar terwujud lembaga keuangan syari'ah yang baik serta dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat sekitar agar tidak ragu untuk bergabung menjadi anggota koperasi syari'ah untuk melakukan pembiayaan atau kerjasama.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dewan Pengawas Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang)” dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) berperan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang dalam menjalankan fungsi pengawasan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) terkait dengan fungsi pengawasan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang ?
2. Bagaimana kesesuaian peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan mekanisme pengawasannya pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang.
2. Untuk mengetahui tentang kesesuaian peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) menurut hukum Islam di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang.

## **D. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar menambah wawasan mahasiswa muamalah selain yang telah di peroleh dari bangku perkuliahan, selain itu juga memberikan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama berada di bangku kuliah ke dalam kehidupan di masyarakat kelak.

## 2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi ilmu pengetahuan bagi penelitian tentang Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah serta untuk mengembangkan khazanah teori yang berkaitan dengan hukum muamalah.

## E. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan, untuk memperdalam penelitian permasalahan maka penulis melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari duplikasi penelitian dan memperoleh konsep atau teori komprehensif yang dapat digunakan untuk menganalisis maka diperlukan adanya suatu telaah pustaka dalam suatu penelitian. Selain itu penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait.

*Pertama*, skripsi karya Fadhilah Azis, UIN Alauddin Makassar, dengan judul skripsi Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Mengawasi Bank Syari'ah (Studi Kasus Bank Sulselbar Syari'ah Ratulangi Makassar)<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana efektivitas kinerja Dewan pengawas Syari'ah di Bank Syari'ah. Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah telah sesuai dengan tugas dan tanggung

---

<sup>7</sup> Fadhilah Azis "Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Mengawasi Bank Syari'ah (Studi kasus bank sulselbar syari'ah ratulangi makassar)", (Skripsi UIN-Alauddin, Makassar, 2017)

jawabnya. Mekanisme kerja Dewan Pengawas syari'ah di Bank Sulselbar Ratulangi mengacu pada sejumlah regulasi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa DSN-MUI, serta *Good Corporate Governance (GCG)*. Pada dasarnya, akad yang dilaksanakan pihak bank tidak bisa berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS melalui opinisyari'ah. Saat pembiayaan DPS juga tidak lepas tangan, melainkan mengevaluasi dengan uji petik untuk melihat kesesuaian akad dan praktik di lapangan. Kinerja dari Dewan Pengawas Syari'ah terbilang efektif. Disamping karena taat terhadap regulasi DSN-MUI, Dewan Pengawas Syari'ah juga terus menjaga *Syari'ah Compliance*, sebagaimana mestinya. Tugas Dewan Pengawas Syari'ah yang dibebankan DSN-MUI seperti pengawasan periodik, mengajukan usul lembaga, melaporkan perkembangan produk, dan merumuskan permasalahan telah dijalankan dengan baik.

*Kedua*, skripsi karya Masliana, UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul skripsi Peran Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari'ah (studi pada Bank BRI Syari'ah)<sup>8</sup>. Penelitian ini membahas tentang kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan draft kontrak di Bank BRI Syari'ah yang ternyata telah sesuai. Dalam hal ini Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam lembaga keuangan tersebut sudah melakukan tugasnya dengan baik yaitu sebagai fungsi pengawas.

---

<sup>8</sup> Masliana "Peran Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari'ah (Studi pada Bank BRI Syari'ah)", (Skripsi UIN-Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

*Ketiga*, skripsi karya Riswanda Fajar Insani, IAIN Salatiga, dengan judul skripsi Analisis Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Ramadana Salatiga<sup>9</sup>. Penelitian ini membahas peran DPS di BMT Ramadana Salatiga dan ternyata belum berjalan secara efektif karena belum dilibatkan dalam operasionalisasi BMT Ramadana. Seharusnya DPS bekerja untuk memastikan dan mengawasi operasional sesuai dengan prinsip syari'ah. Pelaksanaan pengawasan yang belum berjalan efektif terjadi karena beberapa faktor yaitu, kurangnya koordinasi pihak BMT dengan DPS dalam bekerjasama, belum adanya petunjuk pelaksanaan bagi anggota DPS untuk menjalankan tugasnya, kurangnya DPS dalam melakukan pengawasan yang dilaksanakan.

*Keempat*, skripsi karya Anik Arofah, Universitas Sebelas Maret, dengan judul skripsi Peran Dewan Syari'ah terhadap pengawasan aspek syari'ah di BMT Safinah Klaten<sup>10</sup>. Penelitian ini membahas tentang wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BMT Safinah Mengacu pada Pedoman Akad Syari'ah (PAS) 002 BMT. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) telah menjalankan tugas dan menjaga kepatuhan syari'ah sesuai dengan penerapan fatwa DSN-MUI dan PAS 002 BMT.

Adapun penelitian yang akan diajukan penulis, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Yaitu, objek yang akan menjadi tempat penelitian penulis adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS).

---

<sup>9</sup> Riswanda Fajar Insani, "*Analisis Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Ramadana Salatiga*", (Skripsi-IAIN Salatiga, 2017)

<sup>10</sup> Anik Arofah, *Peran Dewan Syari'ah terhadap pengawasan aspek syari'ah di BMT Safinah Klaten*, (Skripsi-Universitas Sebelas Maret, 2008)



Kemudian fokus penelitiannya yaitu ada pada penerapan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Koperasi.

## **F. Metode Penelitian**

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu metode atau cara yang dapat ditempuh untuk mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap suatu permasalahan<sup>11</sup>. Disini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan adalah normatif empiris, penelitian ini terfokus pada penerapan atau

---

<sup>11</sup> Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 35

implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>12</sup>. Guna memperoleh data yang sesuai dengan penelitian yang dikaji, maka penulis melakukan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera, tentang peranan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) terkait dengan fungsi pengawasan.

## 2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari<sup>13</sup>. Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian. Peneliti mendapat informasi dari pihak terkait yaitu anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), Manager HRD, dan Staff Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) NU Sejahtera dalam bentuk wawancara.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi, tetapi bersifat sebagai pendukung, data sekunder dapat dibagi menjadi :

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Seperti, Peraturan Menteri Koperasi dan

---

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 24

<sup>13</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129

Usaha Kecil dan Menengah No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau teori yang diperoleh dari literatur hukum yang terkait dengan objek penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Biasanya diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedi, surat kabar dan sebagainya.<sup>14</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) ialah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) yang beralamat di JL. Jend. Sudirman No 47 kota Semarang. Pertimbangan untuk memilih lokasi ini adalah untuk mengetahui akan implementasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam melakukan pengawasan terkait operasional koperasi dan akad-

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ( Prenada media: 2006), hlm. 141

akad yang digunakan baik dalam produk simpanan maupun pembiayaan secara nyata di lapangan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu<sup>15</sup>. Wawancara, dokumen pribadi, gambar dan percakapan informal semua merupakan sumber data kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan informasi menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumen dari pihak terkait.

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dan penjawab pertanyaan. Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri dari sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.

Penulis melakukan interview atau wawancara terbuka kepada pihak-pihak terkait, agar ada kebebasan bagi mereka mengemukakan jawabannya sebab penulis tidak membatasinya.

---

<sup>15</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 115

Penulis mewawancarai anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera dan perwakilan anggota koperasi (Manager HRD, Staff).

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan lain sebagainya.

Dalam mencari data, penulis menggunakan bahan-bahan dokumen dari berbagai sumber yang berada di lokasi penelitian, seperti data-data mengenai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) seperti sertifikat dari DSN-MUI, Daftar Riwayat Hidup serta data yang berkaitan dengan KSPPS yaitu Company Profile, SOP, Brosur dan lain sebagainya.

### 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh

gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>16</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>17</sup>. Dalam hal ini yang diteliti oleh penulis adalah penelitian tentang Dewan Pengawas Syari'ah dari aspek normatif mengenai peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam fungsi pengawasan terkait dengan operasional pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) ditinjau dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 serta kesesuaian pengawasan Dewan pengawas Syari'ah (DPS) menurut hukum islam melalui fatwa DSN MUI No 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah.

Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup>

Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data adalah:

---

<sup>16</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 126

<sup>17</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 3

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h 89

- a. Reduksi data, yaitu proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian, data dipilih sesuai dengan konsep Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).
- b. Display data, yaitu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk di analisis dan disimpulkan.
- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan. Hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan efektivitasnya pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan maka disini penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah landasan teori yang relevan dengan yang diteliti, yaitu menjelaskan mengenai yang pertama koperasi syari'ah meliputi pengertian, tujuan, dan landasan koperasi syari'ah. Yang kedua teori Dewan Pengawas syari'ah meliputi pengertian, fungsi dan ketentuan lain

yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan yang ketiga teori Hisbah meliputi pengertian dan fungsi Hisbah.

Bab III yaitu gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang meliputi profil pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera diantaranya mengenai sejarah, produk-produk, peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Bab IV yaitu menjelaskan mengenai kesesuaian peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera tentang praktik pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) menurut hukum Islam.

Bab V adalah penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **DEFINISI, LANDASAN HUKUM SERTA PERAN KOPERASI SYARI'AH, DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DAN HISBAH**

#### **A. Koperasi Syari'ah**

##### **1. Pengertian Koperasi Syari'ah**

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah saat ini terus berkembang, masih banyak masyarakat yang awam mengenai istilah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan lebih familiar dengan istilah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Merujuk pada Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), menghimbau setiap BMT untuk merubah dari Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No 16/Per/M.Kum/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS).<sup>19</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang RI No 25 Tahun 1992, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

---

<sup>19</sup> Widiyanto, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 10

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bersandar atas asas kekeluargaan.<sup>20</sup>

Adapun menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah atau KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syari'ah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Farid Hidayat Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syari'ah, maka wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Jumlah anggota Dewan Syari'ah paling sedikit dua orang dan setengahnya memiliki sertifikat DSN-MUI.<sup>22</sup>

Pengertian koperasi syari'ah menurut Ahmad Ifham, koperasi syari'ah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak pula mengandung riba.<sup>23</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah merupakan sebuah lembaga yang bergerak

---

<sup>20</sup> Achmad Sani Alhusain, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 7

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

<sup>22</sup> Farid Hidayat, 2016, Mahkamah, *Alternative Sistem pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance*, Vol.2, No. 1, Desember 2016, hlm. 401

<sup>23</sup> Ahmad Ifham Sholihan, *Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 423

pada bidang keuangan berbasis syari'ah guna mensejahterakan anggotanya sesuai dengan prinsip islam.

## 2. Tujuan Koperasi Syari'ah

Seperti tujuan koperasi pada umumnya, koperasi syari'ah juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Perbedaan diantara keduanya yaitu koperasi syari'ah dipertegas dengan adanya nilai dan norma-norma Islam terkait dengan operasionalnya.

Tujuan lain dari koperasi syari'ah yaitu menciptakan keadilan dan persaudaraan. Prinsip keadilan ini dapat diciptakan dengan cara mendistribusikan pendapatan yang merata kepada anggotanya (keadilan distributif)<sup>24</sup>. Hal ini juga dipertegas dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ آٰلَتِكُمْ لَوْ أَنَّهُمْ قَرَّبُوا لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya: “hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Lebih khususnya dinyatakan dalam QS. Al-Hasyr (59) ayat 7 tentang pentingnya keadilan ekonomi :

<sup>24</sup> Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syari'ah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 17

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَكْمُلُ الرِّسُولُ فَخُذْهُ وَهُوَ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنتهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya: “Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah Kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah sungguh sangat keras hukuman-Nya.”

### 3. Peran dan Fungsi Koperasi Syari’ah

Peran dan fungsi koperasi konvensional, lebih kepada mencari keuntungan, dengan cara memberikan bunga pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (konsumtif) maupun untuk usaha (produktif) diberlakukan dengan mematok bunga yang sama.

Dalam koperasi syari’ah, hal tersebut tidak dibenarkan. Karena setiap transaksi pembiayaan dilakukan dengan cara yang berbeda tergantung jenis kebutuhan anggotanya, dengan imbalan yang diterima seperti margin untuk jual beli dan bagi hasil untuk usaha kerja sama.<sup>25</sup>

Dengan adanya perbedaan tersebut, maka peran dan fungsi koperasi syari’ah adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

<sup>25</sup> Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syari’ah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 17

2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional(fathonah), konsisten dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syari'ah islam.
3. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkn dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkembangkan usaha-uaha produktif anggota.<sup>26</sup>

#### **4. Prosedur Pendirian Koperasi Syari'ah**

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, menerangkan bahwa persyaratan izin usaha adalah:

1. Izin usaha simpan pinjam koperasi diberikan kepada KSP atau USP
2. Izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah koperasi diberikan kepada KSPPS atau USPPS.
3. KSP/KSPPS dan USP/USPPS koperasi memperoleh izin waajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syari'ah untuk KSPPS;
  - b) Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada

---

<sup>26</sup> Ahmad Ifham Sholihan, *Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 424

- USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh koperasi kepada USP/USPPS koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syari'ah untuk USPPS;
- c) Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
  - d) Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
  - e) Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
  - f) Memiliki kantor dan saran kerja; dan
  - g) Memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dengan rekomendasi Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia provinsi/kabupaten/kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bagi KSPPS dan USPPS koperasi.
4. Modal sendiri KSP/KSPPS Primer dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
    - b) Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
    - c) Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp 375.000.000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  5. Modal sendiri KSP/KSPPS Sekunder dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Modal KSP/KSPPS sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);
    - b) Modal KSP/KSPPS sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
    - c) Modal KSP/KSPPS sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  6. Setiap pembentukan USP/USPPS koperasi primer atau USP/USPPS koperasi sekunder, wajib menyediakan modal yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi primer paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan

- b) Modal pembentukan USP/USPPS koperasi sekunder paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>27</sup>

## 5. Landasan Hukum Koperasi Syari'ah

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
3. Koperasi syari'ah berdasarkan syari'ah islam yaitu al-Qur'an dan Sunah dengan prinsip saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).<sup>28</sup>

## 6. Macam-Macam Akad Dalam Koperasi Syari'ah

Secara umum, pembagian akad dalam koperasi syari'ah dari segi ada atau tidaknya kompensasi dibagi menjadi dua yakni, akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

### 1. Akad Tabarru'

Akad Tabarru' merupakan segala bentuk perjanjian yang menyangkut transaksi niralaba yang tidak berorientasi mencari keuntungan (*not for profit*), akad tabarru' dilakukan dengan tujuan saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

<sup>28</sup>Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, ( Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm 10

tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan dan mengharap imbalan apapun kepada pihak lainnya. Hakekatnya, akad tabarru' adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata.<sup>29</sup> Macam-macam akad Tabarru' yaitu:

- a. Qard, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa ada syarat tertentu. Tidak ada batasan jangka pengembalian pinjaman uang tersebut atau meminjamkan tanpa mengharap imbalan.
- b. Wakalah, merupakan akad pemberian kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. Wakalah dilakukan dengan cara penerima kuasa telah melakukan sesuatu yang bentuknya jasa, keahlian, ketrampilan, atau yang lainnya yang dilakukan atas nama orang lain<sup>30</sup>. Rukun dan syarat wakalah, yaitu :
  - a. Rukun wakalah
    1. Orang yang mewakilkan (Muwakkil).
    2. Orang yang diwakilkan (Wakil).
    3. Objek yang diwakilkan.
    4. Sighat (ijab dan qabul).<sup>31</sup>
  - b. Syarat wakalah

---

<sup>29</sup> Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 48

<sup>30</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 119

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta Kencana: 2012), hlm. 300



1. Seorang muwakkil, disyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan di delegasikan kepada orang lain. Dengan alasan, orang yang tidak memiliki otoritas sebuah transaksi, tidak bisa memindahkan otoritas tersebut kepada orang lain. Akad wakalah tidak bisa dijalankan oleh orang yang tidak memiliki ahliyyah, seperti orang gila, anak kecil yang belum tamyiz. Ulama fiqh selain madzhab hanafi menyatakan, akad wakalah tidak bisa dilaksanakan oleh anak kecil secara mutlak.
2. Seorang wakil, disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz. Anak kecil, orang gila, anak belum tamyiz, tidak boleh menjadi wakil, ini menurut Hanafi. Ulama selain Hanafi juga menyatakan hal yang sama. Anak kecil tidak boleh menjadi wakil, karena mereka belum bisa terbebani dengan hukum syar'i. segala tindakan yang dilakukan belum bisa diakui.
3. Objek yang diwakilkan, harus memenuhi beberapa syarat. Objek tersebut harus diketahui oleh wakil, wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Sesuatu yang diwakilkan itu, harus diperbolehkan secara syara'.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Dimyaudiin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 242

c. Wadi'ah, merupakan akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Wadi'ah dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Wadi'ah Yad Al-Amanah*, Akad Wadi'ah dimana barang yang dititipkan tidak bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan selama si penerima titipan tidak lalai.
- 2) *Wadi'ah Yad-Dhamanah*, Akad Wadi'ah dimana barang atau uang yang dititipkan dapat dipergunakan oleh penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang.

d. Kafalah, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Atau dengan kata lain mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.<sup>33</sup>

## 2. Akad Tijarah

Akad Tijarah adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*For Profit Oriented*). Dalam akad ini masing-masing pihak

---

<sup>33</sup> Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 48

yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Macam-macam akad Tijarah yaitu :

- a. Akad Jual Beli, merupakan proses tukar menukar atau menukar barang yang satu dengan yang lain.
- b. Musyarakah, merupakan transaksi penanaman modal dari dua orang atau lebih, untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syari'ah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.<sup>34</sup> Mekanisme akad musyarakah yaitu :
  - 1) Lembaga keuangan syari'ah dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
  - 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan lembaga keuangan syari'ah sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
  - 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah sesuai kesepakatan.
  - 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

---

<sup>34</sup> Muhammad, *Audit & Pengawasan Syari'ah Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm 32

- 5) Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
  - 6) Jangka waktu pembiayaan Akad Musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Keuangan Syari'ah dan Nasabah.
  - 7) Pengembalian pembiayaan Akad Musyarakah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah.
- c. Murabahah, menurut Syafi'i Antonio adalah akad jual beli barang pada harga asal ditambah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati<sup>35</sup>. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/VI/2000 juga menjelaskan bahwa murabahah adalah jual beli barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.<sup>36</sup>

Rukun dan Syarat Murabahah, yaitu :

a. Rukun

1. Pelaku akad, yaitu bai' (Penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytary (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 101)

<sup>36</sup> Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Murabahah

2. Objek akad, yaitu mabi (barang dagangan), dan tsaman (harga).
3. Sighat, (ijab dan qabul) yaitu ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.<sup>37</sup>

b. Syarat

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi disini terlihat adanya unsur keterbukaan.

Secara prinsip, bila syarat dalam poin (1), (4) atau (5) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan untuk :

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuannya atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006, cet 4), hlm. 24

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 104

- d. Mudharabah, merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik modal (shohibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah di sepakati dan kerugian sesuai dengan porsi investasi.<sup>39</sup>

## **B. Dewan Pengawas Syari'ah**

### **1. Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah**

Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai salah satu pengawas pada lembaga keuangan syari'ah sangatlah penting. Karena Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan lembaga independen yang berada pada naungan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang akan mengawasi kegiatan lembaga keuangan di Indonesia.<sup>40</sup>

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN-MUI di Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syari'ah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI.<sup>41</sup>

Adapun menurut Mardian Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional

---

<sup>39</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 98

<sup>40</sup> Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam perspektif Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 224

<sup>41</sup> Neneng Nur Hasanah, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 104

dan produk bank terhadap prinsip syari'ah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Calon anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) diajukan oleh bank syari'ah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan dari DSN-MUI, wajib memiliki 2 anggota Dewan Pengawas Syari'ah.<sup>42</sup>

Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah menerangkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syari'ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syari'ah Nasional (DSN).<sup>43</sup>

## **2. Landasan Hukum Dewan Pengawas Syari'ah**

1. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah RI No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.<sup>44</sup>
2. Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Sepky Mardian, 2015, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, *Tingkat Kepatuhan Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Vol 3 No. 1, hlm.60

<sup>43</sup> Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 11 Tahun 2018

<sup>45</sup> Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah

### 3. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Tujuan utama dibentuknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu untuk mengawasi aktivitas operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itulah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi kegiatan yang ada pada lembaga keuangan syariah beserta produk-produknya, agar sesuai dengan ketentuan. Dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang strategis, Peran tersebut yaitu :

- a. *Supervisor*, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional lembaga keuangan syariah.
- b. *Advisor*, yaitu memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
- c. *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kualitas dan kuantitas industri lembaga keuangan syariah melalui komunikasi masa untuk membrikan sosialisasi, dan peran-peran strategis dalam bentuk hubungan kemasyarakatan.
- d. *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.<sup>46</sup>

---

46 Neneng Nur Hasanah, *Hukum Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 108



Dalam Fatwa DSN MUI No 3 tahun 2000 juga menerangkan tentang tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah, yaitu :

1. Tugas utama Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama Dewan Pengawas Syari'ah adalah :
  - a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.
  - b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.<sup>47</sup>

#### **4. Keputusan DSN MUI No 3 Tahun 2000**

Fatwa DSN MUI No 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Pertama : Pengertian Umum

1. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syari'ah Nasional.
2. Lembaga keuangan syari'ah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syari'ah atau hukum islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya.

Kedua : Keanggotaan DPS

1. Setiap lembaga keuangan syari'ah harus memiliki sedikitnya tiga

---

<sup>47</sup> Fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah.

orang anggota DPS

2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
3. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syari'ah atau telah merusak citra DSN.

Ketiga : Syarat Anggota DPS

1. Memiliki akhlaq karimah.
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari'ah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syari'ah.
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari'ah yang dibuktikan dengan surat/sertifikasi dari DSN.

Keempat : Tugas dan Fungsi DPS

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah :
  - a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.
  - b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Kelima : Prosedur Penetapan Anggota DPS

1. Lembaga keuangan syari'ah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
2. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN,
3. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
4. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS

Keenam : Kewajiban Lembaga Keuangan Syari'ah Terhadap DPS

1. Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.
2. Membantu kelancaran tugas DPS.

Ketujuh : Kewajiban Anggota DPS

1. Mengikuti Fatwa-fatwa DSN.
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah

- difatwakan oleh DSN.
3. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

**Kedelapan : Perangkapan Keanggotaan DPS**

1. Pada prinsipnya, seorang hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syari'ah dan satu lembaga keuangan syari'ah lainnya.
2. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang menjadi anggota DPS, seorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syari'ah dan dua lembaga keuangan syari'ah.
3. Dalam hal perangkapan yang dimaksud, terjadi sebelum adanya ketentuan ini, yang bersangkutan dapat menyesuaikan atau menunggu berakhirnya masa tugas.<sup>48</sup>

## **C. Hisbah Dalam Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Hisbah**

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar dari kata *ha-sa-ba* yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan opini, pandangan dan lain-lain. Secara harfiah (etimologis) hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan.<sup>49</sup>

Hisbah adalah suatu lembaga pengawasan milik pemerintah yang berwenang membuat peraturan (perundang-undangan) tentang perdagangan. Lembaga ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam berbisnis.<sup>50</sup>

Ibnu Taimiyah mendefinisikan Hisbah sebagai lembaga yang

---

<sup>48</sup> Fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah.

<sup>49</sup> Ririn Noviyanti, *Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian*, Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol.2, No 1, Maret 2017, hlm 64

<sup>50</sup> Romly, *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, (Sleman: CV Budi Utama, 2015), hlm. 33

mengawasi pasar dalam Islam yang dilakukan oleh Muhtasib. Muhtasib diberi wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.<sup>51</sup>

Menurut Al-Mawardi bahwasannya hisbah adalah suatu sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil jika keadilan sedang dilanggar atau tidak dihormati, dan melarang apa yang tidak adil ketika ketidakadilan itu sedang dilakukan.

Abu Yusuf mendeskripsikan hisbah yaitu suatu cara untuk melakukan pengecekan timbangan dan takaran, kualitas barang yang ditawarkan untuk dijual, kejujuran dalam dealing dan observasi kebaikan dan kesopanan dalam masalah penjualan dan secara umum pengawasan perilaku masyarakat secara umum.<sup>52</sup>

Definisi lain dari Hisbah Menurut Muhammad al-Mubarak, hisbah dapat diartikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran namun wilayah fungsi kontrol tidak sebatas bidang agama dan morla tetapi melebar pada ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam. Singkatnya, hisbah adalah lembaga yang mengontrol pasar dan adat moral.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Marah Halim, "*Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam: Islam Futura*., Vol X, No 2, Februari 2011

<sup>52</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 163

<sup>53</sup> Ririn Noviyanti, *Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian*, Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol.2, No 1, Maret 2017, hlm. 64

## 2. Mekanisme Pengawasan Dalam Hisbah

Dalam Islam, pengawasan kegiatan perekonomian sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang biasa disebut dengan Wilayat Hisbah dan berlanjut sampai masa Khulafaurrasyidin. Dimana keberadaan Wilayat Hisbah ini selanjutnya dikenal dengan Hisbah dan terus berkembang hingga pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Tugasnya adalah menyerukan kepada kebaikan dan meninggalkan kepada hal-hal yang batil (*al amru bi al ma'ruf wanahy munkar*)

Pada masa Rasulullah SAW, Hisbah belum berwujud dalam sebuah lembaga, hanya sebatas pada pelaksanaannya *al amru bi al ma'ruf wanahy munkar*, pelaksanaannya langsung dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukan pengawasan secara langsung berkeliling pasar untuk melihat pelaksanaan transaksi dan kegiatan perekonomian agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syari'at Islam. Setelah meluasnya daerah kekuasaan Islam pasca penaklukan kota Makkah. Rasulullah SAW mendelegasikan peran dan tugasnya dengan menunjuk Muhtasib (pengawas) yaitu Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Ash dan Ali bin Abi Thalib.<sup>54</sup>

Fungsi pengawasan dalam hisbah sebagai upaya agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Fokus fungsi pengawasan bukan represif atau menunggu kesaahan terjadi, tetapi adalah preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini agar kesalahan tidak

---

<sup>54</sup> Ika Prastyaningsih dan Syamsuri, *Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Implementasi Syari'ah Compliance Perbankan Syari'ah*, Al-Mustahfa, Vo. 3, No 1, Juni 2018, hlm 6

sampai terjadi, walaupun terjadi dapat diketahui dengan segera sehingga dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik maka konsep perencanaan harus jelas.<sup>55</sup>

Adapun peran hisbah antara lain :

1. Peran umum hisbah dalam sektor ekonomi. Peranan umum yang dimaksudkan adalah peranan hisbah dalam menegakkan ma'ruf dan mencegah mungkar yang bersifat umum yaitu pelaksanaannya menyeluruh dan tidak terbatas pada tempat-tempat tertentu saja. Biasanya ia melibatkan perkara-perkara yang bersangkutan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepentingan umum. Antara peranan umum hisbah yang berkaitan dengan sektor ekonomi adalah:
  - a. Menjaga dan mengawasi keshahihan akidah dan ibadah umat islam.
  - b. Mengawasi akhlaq dan mengawasi moral masyarakat.
  - c. Menjaga kesehatan produk.
  - d. Mencegah penindasan dan penganiayaan terhadap golongan lemah.
2. Peranan khusus hisbah dalam sektor ekonomi. Peran khusus hisbah yang dimaksudkan ialah peranan hisbah yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan ekonomi negara. Antara lain:
  - a. Memastikan barang yang dipasarkan adalah halal dan sesuai syara'. Ekonomi islam mempunyai identitasnya tersendiri.

---

<sup>55</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 165

Karena dalam prinsip ekonomi islam bukan semata-mata didasarkan untuk mendapat keuntungan tanpa mengambil pertimbangan terhadap agama dan mudharat yang mungkin timbul bagi masyarakat. Sehubungan dengan ini, Islam menetapkan setiap barang yang dipasarkan hendaklah dipastikan halal dan bermanfaat bagi pengguna.

- b. Memberantas penipuan dan penyelewengan pada barang dan harga. Penipuan merupakan perkara yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi dalam sebuah masyarakat. Oleh sebab itu islam memandang tinggi perniagaan yang jujur dan benar. Muhtasib dalam menangani dan memberantas penipuan dan penyelewengan para penjual pada barang dan harga ini hendaklah mencegah perbuatan tersebut.
- c. Memerangi perbuatan ikhtikar. Ikhtikar yang berarti aniaya, zalim dan menimbun barang.
- d. Mencegah urusan niaga yang mengandung unsur riba.<sup>56</sup>

Hukum riba amat jelas kedudukannya dalam firman Allah SWT

Qs Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا بَوَّالًا يَقُو مُوْنًا إِلَّا كَمَا يَقُوُّمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْئِلَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَاسْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

<sup>56</sup> Ririn Noviyanti, Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian, (Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syari'ah), Vol.2, No 1, Maret 2017, hlm 80

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>57</sup>

### 3. Hisbah Di Indonesia

Dalam hisbah (lembaga pengawasan) terdapat Muhtasib (pengawas) yaitu orang yang bertugas melakukan pengawasan perdagangan (pengawas pasar). Muhtasib adalah seorang yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau pimpinan untuk mengawasi berbagai aktivitas pasar serta pergerakan komoditas kebutuhan masyarakat.<sup>58</sup>

Lembaga pengawasan (Hisbah) yang terkait di Indonesia tidak dikuasai oleh satu lembaga, Hisbah berpisah hingga menjadi beberapa lembaga kontrol diantaranya: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Departemen Perdagangan, KPPU, dan lain sebagainya. Dalam lembaga tersebut terjun dalam bidang pengawasan dan juga berorientasi pada bidang ekonomi. Pada Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) Hisbah menjelma dalam bentuk Dewan Pengawas Syarii’ah (DPS) yang secara khusus mengawasi berbagai akad yang dilakukan oleh Lembaga

---

<sup>57</sup> Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per Kata Asbabun Nuzul dan Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm 45

<sup>58</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 141



Keuangan Syari'ah (LKS) tersebut agar sesuai dengan nilai-nilai islam.<sup>59</sup>

Dewan Pegawai Syari'ah (DPS) yang memang menjadi lembaga pengawas pada lembaga keuangan syari'ah mengawasi operasional lembaga tersebut secara independen. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) ditetapkan oleh DSN-MUI. Seluruh pedoman produk, jasa layanan dan operasional lembaga keuangan syari'ah harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip syari'at islam.

Dewan pengawas Syari'ah memiliki fungsi untuk :

- a. Melaksanakan pengawasan secara periodik, pada lembaga keuangan syari'ah,
- b. DPS berkewajiban mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- d. Bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman.
- e. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Romly, Al-Hisbah Al Islamiyah: Sistem Pengawasan Dalam Islam, ( Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 42

<sup>60</sup> Neneng Nur Hasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 109

#### 4. Persamaan Dan Perbedaan Hisbah Dengan Dewan Pengawas Syari'ah

Dalam hal pengawasan, pasti setiap lembaga mempunyai mekanisme dan caranya masing-masing. Hisbah adalah suatu lembaga pengawasan ekonomi yang dimiliki oleh Islam sepanjang sejarahnya. Fungsi pengawasan ini tidak lepas dari gambaran tugas dan wewenangnya yang telah dipaparka. Begitu pula dengan lembaga pengawas modern seperti Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) memiliki mekanisme pengawasannya tersendiri.

Berikut akan diuraikan mengenai perbedaan dan persamaan pengawasan antara Hibah dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).<sup>61</sup>

Persamaan antara Hisbah dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) :

- a. Sama dalam hal mengawasi dalam bidang perekonomian UMKM yang terletak di pasar.
- b. Sama dalam menindaklanjuti apabila ada kecurangan seperti ada seorang pedagang yang mencederai akad/merugikan konsumennya.
- c. Sama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
- d. Hukuman yang diberikan sama-sama dalam bentuk preventif atau pencegahan.
- e. Boleh bertindak langsung ketika menemui permasalahan, tanpa menunggu laporan dari masyarakat.

---

<sup>61</sup> Alvin Mushafy Abdullah, "Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern", (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

Perbedaan antara Hisbah dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) akan diuraikan berdasarkan tabel berikut ini.<sup>62</sup>

Tabel 1. 1

No	Hisbah	DPS
1.	Bersifat umum, mengawasi berbagai kegiatan perekonomian	Bersifat khusus, DPS hanya bertugas mengawasi pada lembaga keuangan syari'ah
2.	Hisbah dijalankan dalam Negara Islam yang dimulai sejak zaman Rasulullah sampai masa kekhalifahan setelahnya.	Lembaga pengawas modern seperti DPS dijalankan di Indonesia dalam bentuk republik dan negara yang menganut UUD dan Pancasila serta bukan negara islam dan dibentuk setelah ada peraturan yang berlaku.
3.	Peran Hisbah dapat berjalan dengan maksimal karena petugasnya yang menyeluruh disetiap tempat	Peran DPS belum optimal, dikarenakan belum meratanya distribusi petugas yang ditugaskan oleh lembaga pengawas.
4.	Fungsi Hisbah dijalankan sesuai dengan AL-Qur'an dan Hadits	Fungsi Pengawasan DPS sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang ada.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

**BAB III**  
**PRAKTIK PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI KSPPS**  
**NUSA UMMAT SEJAHTERA SEMARANG**

**A. Profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera**

**1. Sejarah dan Gambaran Umum KSPPS Nusa Ummat Sejahtera**

Kondisi perekonomian Indonesia terutama *nahdliyyin* (umat) masih memerlukan lembaga keuangan syari'ah yang mampu mengembangkan ekonomi umat utamanya yang berada di level *grass root* (usaha mikro dan kecil). Penduduk kota Semarang yang mayoritas beragama Islam, mereka ini sebagai pelaku usaha ekonomi menengah kebawah. Untuk mengembangkan ekonomi menengah kebawah, maka dibutuhkan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi syari'ah.<sup>63</sup>

Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) akan memberikan kontribusi yang positif bagi hadirnya pengembangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat menengah kebawah. Berawal dari latar belakang itulah NU sebagai organisasi dengan basis kemasyarakatan yang besar, tersebar merata diseluruh penjuru nusantara dengan struktur organisasi yang tertata dan mengakar

---

<sup>63</sup> Company Profile KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

kuat, mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) bernama KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA.<sup>64</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) NUSA UMMAT SEJAHTERA memulai kiprahnya didalam bidang koperasi pada tahun 2008. Setelah melalui beberapa proses sebagai berikut :

Pada tanggal 29 Mei 2003 dengan melalui anggotanya mendirikan koperasi “Bumi Sejahtera” yang berlokasi di Jl. Raya Manyaran-Gunungpati km 10 Semarang. Dan telah membuat unit usaha toserba, serta bertekad melakukan kegiatan usaha yang sepenuhnya berdasarkan syari'at Islam.

Pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 25 April 2008 berdasarkan keputusan dari Dinas Koperasi dan UMKM koperasi “Bumi Sejahtera” berganti nama menjadi koperasi “NU Sejahtera”. Sebagai kepastian hukum atas keberadaan lembaga yang diharapkan mampu menjadi pengayom dan pengembang perekonomian umat dengan basis syari'ah. Berdasarkan Akta No. 180.08/315, tertanggal 5 Mei 2007.<sup>65</sup>

Sebagai badan usaha koperasi didalam pengelolaannya harus baik seperti bentuk badan usaha lainnya. Disamping itu juga sebagai organisasi ekonomi, koperasi harus mengikuti hukum-hukum ekonomi yang rasional serta norma-norma yang berlaku didalam dunia usaha. Hal ini dimaksudkan agar koperasi dapat berkembang sebagai badan usaha yang sehat dan kuat dalam pengelolannya. Kemudian pada tanggal 16

---

<sup>64</sup> Company Profile KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

<sup>65</sup> Company Profile KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

maret 2009, keberadaan koperasi NU Sejahtera sudah ditingkatkan dengan tingkat operasionalnya wilayah provinsi dengan badan hukum nomor 05/PAD/KDK.11/III/2009/. Surat Ijin Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor : 02/SISPK/KDK.11/I.2010. Dua tahun sejak koperasi NU Sejahtera berdiri, telah memiliki UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah) yaitu berupa Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki beberapa kantor cabang diantaranya Gunungpati, Manyaran, Genuk, Pudakpayung, Klipang, Mangkang, Magelang, dan Kebumen. Kantor pusatnya berada di JL. Raya Semarang kendal KM 15 No 99 Mangkang.

Eksistensi Koperasi NU Sejahtera saat ini memiliki kurang lebih 150.000 anggota (mitra usaha) dengan dana kelolaan 415 milyar dan selalu berkembang. Dalam perkembangan usahanya saat ini koperasi NU Sejahtera mempunyai 1 kantor pusat dan 10 kantor cabang dalam Kota Semarang dan 63 kantor cabang luar kota Semarang.<sup>66</sup>

Adapun terkait dengan Visi, Misi dan Tujuan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera adalah sebagai berikut :

#### Visi

Menjadi koperasi pemberdaya ekonomi umat yang mandiri dan berlandaskan syari'ah.

---

<sup>66</sup> Company Profile KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

### Misi

- a. Menjadi penyelenggara layanan keuangan berbasis syari'ah yang prima
- b. Mengembangkan model pengelolaan keuangan umat yang efektif, efisien, transparan, profesional
- c. Mengembangkan kerjasama ekonomi syari'ah.
- d. Mengembangkan sistem ekonomi umat yang berkeadilan sesuai prinsip syari'ah.

### Tujuan

Tujuan didirikannya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera yaitu :

- a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syari'ah yang amanah dan berkeadilan.
- b. Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari'ah.
- c. Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan dan usaha yang bersih, jujur, dan transparan.
- d. Meningkatkan semangat dan peran serta umat dalam kegiatan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Standar Operasional Prosedur KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

## 2. Fungsi KSPPS Nusa Ummat Sejahtera

Dalam menjalankan peran sebagai koperasi syari'ah, maka fungsi dari KSPPS Nusa Ummat Sejahtera sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syari'ah islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demikrasi ekonomi.
- d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.<sup>68</sup>

## 3. Asas dan Prinsip Dasar KSPPS Nusa Ummat Sejahtera

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) didirikan pada masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Prinsip dasar KSPPS NU Sejahtera adalah :

- a. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), (terindah *thayyiban*), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam (keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan)

---

<sup>68</sup> Company Profile KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang



- b. Barokah, artinya berdayaguna, berhasilguna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah).
- d. Demokratis, partisipatif dan inklusif.
- e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
- f. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- g. Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.<sup>69</sup>

#### **4. Produk-Produk di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera**

##### **1. Jasa simpanan**

###### **a) Simpanan Wadi'ah**

Merupakan simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Mendapatkan bonus 2,4% /tahun.<sup>70</sup> Dengan syarat dan ketentuan :

1. Setoran awal atau saldo minimal Rp.10.000,-
2. Pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu
3. Tidak kena pajak untuk semua jenis simpanan

---

<sup>69</sup> Standar Operasional Prosedur KSPPS Nusa Ummat Sejahtera

<sup>70</sup> Brosur KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

b) Simpanan Pendidikan

Merupakan simpanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa sekolah.<sup>71</sup> Dengan syarat dan ketentuan :

1. Setoran awal atau saldo minimal Rp.10.000,-
2. Bila terkumpul mencapai Rp 5.000.000,- atau lebih, tidak diambil selama 5 bulan maka akan mendapatkan tambahan bagi hasil atau bonus sebesar  $0,2\% \times \text{saldo akhir setiap bulan}$  dan beasiswa  $0,5\% \times \text{saldo akhir setiap bulan}$ .

c) Simpanan berjangka

Merupakan simpanan berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari Rp 1.000.000,- dengan tingkat bagi hasil mulai  $0,3\% / \text{bulan}$  hingga  $1\% / \text{bulan}$ .<sup>72</sup> Syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Setoran minimal Rp 1.000.000,- dan atau kelipatannya.
2. Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan pinalti setara dengan 5%.
3. Bagi hasil bisa diambil setiap bulan dan dibukakan rekening wadi'ah dan diterbitkan buku hasil setor berupa warkah.
4. Zakat dipungut oleh LAZISNU sebesar 2,5% dari bagi hasil yang tersedia atas dasar persetujuan dari shohibul Maal kepada LAZISNU.

---

<sup>71</sup> Brosur KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

<sup>72</sup> Brosur KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

d) Simpanan Haji dan Umroh

Merupakan simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan syarat dan ketentuan :

1. Setoran awal minimal Rp 10.000.000,- dan atau kelipatannya. Setelah mencapai Rp 20.000.000,- di daftarkan haji dan selanjutnya mengikuti program tabungan pelunasan BPIH. Dan disetor untuk pelunasan setelah dibuka masa pelunasan.
2. Fasilitas bagi jamaah berupa bimbingan manasik oleh KBIH NU dibiayai oleh KSPPS NU Sejahtera dan souvenir berupa perlengkapan haji.
3. Margin keuntungan 16,8% /tahun = 1,4% /bulan.
4. Jangka waktu maksimal 4 tahun.
5. Jaminan sertifikat tanah dengan menggunakan pengikatan APHT. Biaya ditentukan Notaris.
6. Jaminan BPKB mobil dengan pengikatan fidusia. Biaya ditentukan Notaris.
7. Cara angsuran = bulanan.
8. Biaya administrasi = sesuai jangka waktu.
9. Biaya dibayar dimuka termasuk biaya materai 2 lembar.<sup>73</sup>

e) Simpanan Pelunasan Haji

---

<sup>73</sup> Brosur KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

Merupakan simpanan bagi calon jamaah haji yang sudah mendapatkan porsi. Syarat dan ketentuan :

1. Setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan atau kelipatannya.
2. Proses pembayaran pelunasan dibantu pihak KSPPS NU Sejahtera.
3. Syarat-syarat mengisi formulir dilengkapi FC, KTP, BPIH buku tabungan bank.
4. Dana simpanan tidak bisa diambil kecuali untuk pelunasan haji.

f) Simpanan Qurban dan Hari Raya

Dikhususkan bagi mitra yang hendak menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan untuk hari raya dengan setoran awal mulai dari Rp 100.000,-. Setoran dapat dilakukan setiap hari tanpa dibatasi sedangkan pengambilan dapat dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan hari raya.<sup>74</sup>

g) Simpanan Pensiun

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang telah berakhir masa kerjanya atau pensiun.

h) Zakat infaq dan Shodaqoh

---

<sup>74</sup> Brosur KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

Merupakan salah satu bentuk layanan sosial yang diberikan KSPPS NU Sejahtera untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS umat.<sup>75</sup>

## **2. Jasa pembiayaan**

### **a) Musyarakah**

Jasa pembiayaan musyarakah merupakan tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra KSPPS NU Sejahtera. Keuntungan (hasil usaha) yang di peroleh dari tambahan modal kerja akan dibagi antara pihak KSPPS NU Sejahtera dan mitra usaha berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.<sup>76</sup>

### **b) Murabahah**

Merupakan jasa pembiayaan yang mendasarkan pada asaa jual beli, dengan KSPPS NU Sejahtera bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai dengan kesepakatan antara pihak KSPPS NU Sejahtera dengan mitra usaha.<sup>77</sup>

Syarat dan ketentuan pembiayaan :

#### **1. Mengisi formulir**

---

<sup>75</sup> Brosur KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

<sup>76</sup> Standar Operasional Prosedur KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

<sup>77</sup> Standar Operasional Prosedur KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

2. Foto Copy KTP suami istri atau wali, Foto Copy kartu keluarga (KK).
3. Foto Copy Jaminan (warkah, BPKB, disertai STNK, sertifikat tanah disertai SPPT), bila barang atas nama orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa menjual dari pemegang hak.
4. Bila pemohon menggunakan penjamin baik lembaga maupun perorangan harus tertulis dan bermeterai cukup.
5. Foto Copy legalitas (bagi badan hukum).
6. Menjadi mitra usaha.
7. Membuka rekening simpanan.
8. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.
9. Penggunaan jasa ini dilakukan dikenai biaya akad, provisi, dan administrasi.<sup>78</sup>

## **5. Inovasi Layanan**

1. Layanan yang di berikan dan disediakan oleh KSPPS NU Sejahtera akan selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra usaha.

---

<sup>78</sup> Brosur KSPPS Nusa Ummat Sejahtera

2. Loker pembayaran dan tagihan, disediakan bagi seluruh masyarakat daemi kemudahan dalam pembayaran tagihan PLN, Telkom dan pembelian pulsa telepon seluler.
3. Transfer antar bank, disediakan bagi mitra usaha yang membutuhkan pemindahan dana dari KSPPS NU Sejahtera ke berbagai bank baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>79</sup>

#### **B. Praktik Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syari'ah Pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera**

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera telah memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang berjumlah 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Masing-masing anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), serta kedua anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) tersebut sudah memiliki sertifikat dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indoneusa (DSN-MUI) tentang Pelatihan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Koperasi Syari'ah.<sup>80</sup>

Dalam menjalankan tugas dan memberikan pertanggungjawaban ketika RAT, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) juga harus melakukan pengawasan terkait dengan prinsip syari'ah. Oleh karena itu harus memiliki syarat dan ketentuan dalam pengangkatan sebagai pengawas. Pengawas

---

<sup>79</sup> Company Profile KSPPS Nusa Ummat Sejahtera

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sakdullah Manager HRD KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

tersebut dipilih dari dan oleh anggota yang juga memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan manajerial yang baik.
2. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif.
3. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
4. Memiliki kemampuan dan wawasan tentang perkoperasian.
5. Mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan jasa keuangan syari'ah atau magang dalam usaha jasa keuangan syari'ah yang dibuktikan dengan sertifikat.
6. Diantara pengawas tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu menurut garis lurus kebawah dan maupun kesamping, dibuktikan dengan akta kelahiran, kartu keluarga dan surat nikah.<sup>81</sup>

Selain memiliki kriteria sebagai pengawas, untuk menjadi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSSPS) Nusa Ummat Sejahtera, calon anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) akan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Calon anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) diminta dan ditunjuk oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS).
2. Calon anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) menjalani *fit and propper test* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>81</sup> Standar Operasional Prosedur KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang



3. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI.
4. Ditetapkan pada saat rapat anggota.<sup>82</sup>

Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera, pada dasarnya tugas dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah memberikan opini syari'ah terkait dengan produk yang ada secara keseluruhan baik itu produk simpanan maupun pembiayaan. Serta memastikan segala kegiatan operasional yang ada sesuai dengan prinsip syari'ah.

Adapun pengajuan opini syari'ah terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang yaitu, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) mengajukan draft yang berisi usulan produk-produk baru berupa simpanan atau pembiayaan kepada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), kemudian Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) akan meneliti dan memberi pendapat tentang produk tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), kemudian produk tersebut akan dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) sebagai produk baru.<sup>83</sup>

Dikarenakan kesibukan dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) maka pengawasan terkait kegiatan operasional juga hanya dilakukan via telepon,

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Hadlor Anggota Dewan Pengawas Syari'ah KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sakdullah Manager HRD KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) hanya beberapa kali datang ke kantor maka efektivitas pengawasannya juga kurang. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) menjelaskan bahwa:

*“Tugas DPS disini hanya mengawasi apa yang sudah berjalan, karena DPS tidak seperti karyawan biasa yang setiap hari datang ke kantor, jadi kadang aktif, kadang pasif dalam pengawasan.”<sup>84</sup>*

Dalam menjalankan kegiatan pada lembaga keuangan syari'ah, pasti ditemukan kesalahan. Berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan operasional yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang, selama menjadi anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) menurut Bapak Ahmad Hadlor masih menemukan kesalahan. Beliau menuturkan sebagai berikut :

*“Ada proses yang tidak benar yang terjadi dilapangan, seperti take over barang dengan cara langsung menggunakan akad murabahah, disitu harus ada akad wakalah, dan bukti kwitansi atau pembayaran juga harus dilengkapi untuk mengetahui barang yang dibeli sesuai dengan objek yang telah diakadkan”<sup>85</sup>*

Menanggapi hal tersebut, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) menjelaskan tentang akad yang ada. Awal mulanya dalam proses perjanjian akad murabahah pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera menjelaskan secara rinci biaya apa saja yang akan dibutuhkan, namun dalam praktiknya di lapangan nasabah atau anggota tidak menginginkan proses yang berbelit-belit dan merepotkan, anggota ingin proses yang cepat. Berdasarkan kesepakatan bersama, pihak KSPPS tidak menyediakan barang melainkan

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Hadlor Anggota Dewan Pengawas Syari'ah KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Hadlor Anggota Dewan Pengawas Syari'ah KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

hanya menyediakan sejumlah uang yang dibutuhkan anggota dengan tambahan surat keterangan yang berisi anggota membelanjakan uang yang telah diterima sesuai dengan akad yang disepakati. Dalam akad murabahah dengan surat keterangan tersebut sebagai pengganti akad wakalah. Proses perjanjian akad tersebut terjadi dalam satu waktu secara bersamaan diawali dengan perjanjian akad murabahah dulu dilanjutkan dengan akad wakalah. Setelah itu dana bisa dicairkan dan tidak ada laporan kembali dari pihak anggota yang penting anggota memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulan.

Namun tetap kita pantau via telepon apakah anggota sudah membelanjakan barang yang dibutuhkan atau belum, kita juga sudah mengikuti saran dari DPS, untuk pemenuhan bukti pembayaran seperti kwitansi dan sejenisnya memang tidak ada.”<sup>86</sup>

Pada dasarnya, Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) hanya mengawasi dan mengatur tentang produk-produk yang berhubungan dengan simpanan atau pembiayaan, dan tidak mengatur tentang perilaku karyawan dan pemahaman karyawan terhadap produk yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS). Disebabkan tidak ada aturan dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait hal tersebut. Namun, untuk peningkatan kualitas sumber daya insani yang lebih baik Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) tetap memberi pengarahan.

*“Sejauh ini pemahaman karyawan tentang akad-akad masih harus ditingkatkan lagi, DPS memerintahkan direksi, untuk mengadakan*

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sakdullah Manager HRD KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

*workshop dan memberikan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM.”<sup>87</sup>*

Pentingnya kedudukan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada lembaga keuangan syari’ah untuk mengawasi kepatuhan syari’ah, baik dari segi akad yang digunakan, produk dan operasionalnya dengan tujuan untuk memastikan agar seluruh kegiatan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) tersebut berjalan sesuai prinsip syari’ah.

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Hadlor Anggota Dewan pengawas Syari’ah KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH (DPS) DALAM PENGAWASAN DI KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA SEMARANG**

#### **A. Analisis Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Pengawasan di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera**

Berdasarkan paparan yang menjelaskan terkait dengan pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada perbankan atau lembaga keuangan syari'ah. Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) perlu memiliki persyaratan khusus, karena tugas dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah mengawasi kegiatan lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Sehingga anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) diharapkan memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang muamalah, hukum, ekonomi dan juga memiliki kemampuan yang baik untuk memajukan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).<sup>88</sup>

Pada prinsipnya, seorang anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) hanya dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di satu perbankan syari'ah dan satu Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga memenuhi kualifikasi dan yang dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), seseorang dapat

---

<sup>88</sup> Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia Persepektif Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 225

diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebanyak-banyaknya pada dua perbankan atau Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya<sup>89</sup>. Mengenai pengangkatan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), mekanismenya dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan ditetapkan ketika Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kredibilitas suatu lembaga keuangan syari'ah sangat ditentukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam kinerjanya. Kompetensi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) harus dioptimalkan terkait dengan pengawasan internal untuk membangun jaminan kepatuhan syari'ah bagi seluruh pihak yang terkait.

Sebagai pengawas di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sangatlah penting, dikarenakan menyangkut dengan kepentingan seluruh pengguna jasa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tersebut. Sebab, salah satu yang membedakan antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan koperasi konvensional yaitu adanya Dewan Pengawas Syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertanggung jawab penuh atas konsistensi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dalam menjalankan prinsip-prinsip syari'ah. Karena sistem syari'ah yang diterapkan bukan hanya sebagai strategi guna mencari nasabah (anggota) dari kalangan umat Islam yang jumlahnya besar, tetapi menjadi landasan

---

<sup>89</sup> Adrian Sutendi, *Perbankan Syari'ah: Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 143

yang sangat mendasar. Dari sinilah kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) akan muncul.

Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) harus ada dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Dalam keputusan tersebut berisi persyaratan izin usaha bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (USPPS) yaitu setiap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (USPPS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dengan rekomendasi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) provinsi/kabupaten/kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>90</sup>

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, perbankan dan juga hukum Islam dalam hal ini khususnya muamalah. Serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) wajib memenuhi persyaratan yaitu memiliki integritas yang baik, kompetensi dan reputasi keuangan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

<sup>91</sup> Muhammad, *Audit & Pengawasan Syari'ah Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 61

Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang memenuhi persyaratan integritas tersebut antara lain adalah pihak-pihak yang :

1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perbankan syari'ah yang sehat.
4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang memenuhi persyaratan kompetensi tersebut antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan tersebut antara lain adalah pihak yang :

1. Tidak pernah masuk dalam kredit/pembiayaan macet.
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dilihat dari ketentuan tersebut, maka setiap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (USPPS) harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Dalam hal tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera telah memiliki anggota Dewan Pengawas



Syari'ah (DPS) yang berjumlah 2 (dua) orang, masing-masing menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Serta 2 (dua) orang yang telah menempati kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) juga sudah memenuhi kualifikasi dan memenuhi persyaratan. Maka, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera telah mematuhi peraturan tersebut dan telah sesuai.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang, selain mengacu pada Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. Juga berlandaskan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera.

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera, tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah sebagai berikut :

1. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan prinsip syari'ah
2. Mengkomunikasikan kepada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) usul dan saran pengembangan produk dan jasa koperasi yang memerlukan

kajian dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

3. Mengawasi perkembangan produk baru.<sup>92</sup>

Sedangkan wewenang dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yaitu:

1. Meneliti barang, catatan, berkas, bukti-bukti dan dokumen lainnya yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera.
2. Mendapatkan keterangan yang diperlukan baik dari pengurus, manajemen atau staff.
3. Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus dan manajemen.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya atas persetujuan pengurus.
5. Melaporkan kepada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan pihak berwenang tentang keadaan kesyari'ahan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang.<sup>93</sup>

Berdasarkan peraturan tersebut, anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera belum sepenuhnya menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini karena Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bukan seperti karyawan biasa yang setiap hari datang ke kantor untuk meninjau kegiatan operasional pada KSPPS. Serta dalam praktik pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas

---

<sup>92</sup> Standar Operasional Prosedur (SOP) KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang

<sup>93</sup> Standar Operasional Prosedur (SOP) KSPPS Nusa Ummat Sejahtera

Syari'ah (DPS) seperti pengecekan terhadap produk yang ada tidak setiap akad diteliti, jarang melakukan *review* kembali tentang produk yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) yang diawasinya. Serta tidak melakukan pertemuan rutin seperti rapat untuk lebih memastikan kegiatan yang ada dikoperasi berjalan lancar atau sekedar meninjau kondisi kopersi.

Selain itu, kurangnya komunikasi antara Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Pengurus Koperasi juga menjadi salah satu sebab lemahnya pengawasan. Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera melakukan pengawasan tidak secara berkala, waktunya tidak tetap dan tidak tentu. Sehingga pengawasannya kurang optimal.

Hal tersebut terjadi karena kesibukan dari anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) menuturkan :

*“Tugas DPS disini hanya mengawasi apa yang sudah berjalan, karena DPS tidak seperti karyawan biasa yang setiap hari datang ke kantor, jadi kadang aktif, kadang pasif dalam pengawasan.”*<sup>94</sup>

Kemudian menurut Bapak Sibyan, kinerja Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) juga belum maksimal, beliau memberi tanggapan :

*“Secara Struktural DPS memang ada, tetapi secara fungsional belum berjalan dengan baik. Jadi misalnya kita ada kendala atau hal-hal lain yang menyangkut kegiatan operasional koperasi yang memerlukan saran atau kebijakan, kita harus menunggu DPS nya dulu, janjiannya dulu untuk bisa meluangkan waktunya, kemudian untuk review produk yang ada juga jarang dilakukan”.*<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Hadlor Anggota Dewan Pengawas Syari'ah

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sibyan, Pengurus KSPPS Nusa Ummat Sejahtera

Menurut penulis, apabila telah ditunjuk untuk menjadi anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, mengingat begitu pentingnya kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terutama dalam pengawasan akad-akad atas produk yang digunakan. Seharusnya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dapat melakukan pengawasan secara periodik, terencana dan teratur. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Sehingga pengawasan terhadap kegiatan operasional dapat terkontrol dan dipastikan waktunya agar dapat berjalan optimal.

Faktor lain yang menyebabkan kurang optimalnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di KSPPS adalah belum adanya peraturan tentang berapa besaran insentif yang diterima oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Selama ini Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) hanya menerima SHU dari KSPPS yang diawasinya.

Kemudian untuk laporan yang ditujukan kepada Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang kegiatan usaha dan perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang diawasinya, anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang juga tidak membuatnya dan tidak ada laporan kepada Dewan

Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) hanya membuat laporan untuk RAT saja.

Sebaiknya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) rutin mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengawasan kepada DSN-MUI atau melakukan pertemuan secara berkala. Untuk mengantisipasi adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam kegiatan yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS). Dan apabila Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) menemui kesulitan atau terjadi kendala pada Koperasi Syari'ah yang diawasinya DSN-MUI dapat membantu memberikan saran. Namun, Sejauh ini belum ada konsekuensi atau sanksi yang tegas dari DSN-MUI terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) apabila tidak melaporkan hasil kegiatan operasionalnya.

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syari'ah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera mengenai fasilitas, tidak disediakan ruangan khusus untuk Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) saat menjalankan kegiatannya. Ketika anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) melakukan kunjungan ke kantor koperasi, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) melakukan tugasnya dengan menempati ruangan rapat. Maka dari itu, diharapkan pada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah menyediakan ruangan untuk Dewan Pengawas

Syari'ah (DPS) agar memudahkan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam melakukan audit.

Dilihat dari parameter yang ada, peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) selama ini, pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena masih terdapat kendala dan belum berjalan optimal. Serta masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera**

Lembaga pengawasan dalam Islam (*Hisbah*) merupakan lembaga yang mengawasi kegiatan perekonomian, dan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pengawasan merupakan usaha dalam memerintahkan terhadap kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dalam *Hisbah* terdapat Pengawas atau pengontrol (*Muhtasib*) yaitu orang yang mengawasi perdagangan pasar.<sup>96</sup>

*Hisbah* merupakan lembaga pengawas yang memiliki peran penting dalam perekonomian umat Islam, yang berperan sebagai pengawas pasar agar berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam kegiatan perekonomian tidak terjadi, sehingga dapat ditegakkan keadilan dan kesesuaian dengan prinsip syari'ah.

---

<sup>96</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19

Adapun fungsi Hisbah yang sesungguhnya, mempunyai arti yang luas dari berbagai aspek dalam kehidupan manusia, baik politik, sosial, ekonomi maupun keagamaan. Namun dalam hal ini, akan diuraikan mengenai fungsi Hisbah dalam bidang ekonomi, yaitu<sup>97</sup> :

1. Memastikan produk yang dipasarkan halal dan sesuai syari'at.
2. Mencegah praktik penipuan, penyelewengan, dalam kegiatan ekonomi.
3. Mencegah praktik dalam transaksi riba.
4. Mencegah upaya praktik manipulasi harga.
5. Mengawal penetapan harga.

Lembaga pengawasan (*Hisbah*) yang terkait di Indonesia tidak dikuasai oleh satu lembaga, *Hisbah* berpisah hingga menjadi beberapa lembaga kontrol diantaranya: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Departemen Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain sebagainya. Dalam lembaga tersebut terjun dalam bidang pengawasan dan juga berorientasi pada bidang ekonomi.<sup>98</sup>

Pesatnya pertumbuhan ekonomi syari'ah di Indonesia dapat dilihat dengan banyak munculnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) menghadirkan problem tersendiri. Demi menjamin praktik kegiatan ekonomi syari'ah agar tidak terjadi penyimpangan, maka pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) *Hisbah* menjelma dalam bentuk Dewan

---

<sup>97</sup> Zulfaqar Bin Mamat, *Institusi Hisbah dan Penerapannya Dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam*", Jurnal Muamalat, Vol.III(2010), hlm. 113

<sup>98</sup> Romly, *Al Hisbah Al Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, ( Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 42

Pengawas Syari'ah (DPS) yang secara khusus mengawasi berbagai akad yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tersebut agar sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Pengawasan dalam kegiatan yang ada di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan prinsip syari'ah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Sebagai pengawas dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), khususnya dalam hal ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS), Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam sistem pengawasannya mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam, yaitu :

1. *Jalbul Mashalih*, yaitu upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan, yakni resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi.
2. *Dar'ul Mafasid*, yaitu upaya untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material.
3. *Saddudz Dzari'ah*, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syari'ah dan peraturan-peraturan lainnya.



Pengawasan dalam kegiatan yang ada di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dengan prinsip syari'ah harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi dan diketahui sejak awal. Pengawasan menyeluruh tersebut meliputi<sup>99</sup> :

- a) *Riqabah Musabaqah* yaitu pengawasan prefentif dan berkala yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi.
- b) *Riqabah lahiqah* yaitu pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syari'ah.
- c) *Riqabah a'mal* yaitu pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.
- d) *Riqabah dzatiah* yaitu pengawasan berbasis moral pada aspek individu dan pengelola bisnis tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur pengawasan tersebut, mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera masih terdapat ketidaksesuaian dengan pemenuhan unsur-unsur pengawasan secara menyeluruh. Dalam praktiknya pada pengawasan prefentif dan berkala, tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) belum melakukan pengawasan secara periodik terhadap produk-produk yang ada dan waktunya tidak

---

<sup>99</sup> Muhammad Ridwan, *Ulama Dalam Pengawasan Syari'ah Di BMT*, 2007

tetap. Sebaiknya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) membuat jadwal kunjungan yang rutin agar pengawasannya dapat tersusun, terencana dan dipastikan waktunya agar memudahkan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Sedangkan dalam unsur pengawasan operasional tentang praktik bisnis, ternyata masih ditemukan kesalahan. Hal tersebut terjadi karena kinerja Dewan Pengawasan Syari'ah (DPS) yang kurang optimal dan lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), contohnya seperti Dewan Pengawas Syari'ah yang tidak melakukan pengawasan secara berkala, waktunya tidak tetap dan tidak terjadwal serta tidak ada *review* kembali terkait akad-akad yang sudah ada. Misalnya, dalam pembiayaan dengan akad murabahah untuk pembelian barang dan akad wakalah. Akad murabahah adalah jual beli barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Sedangkan, wakalah adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan sesuatu.

Proses akad murabahah awal mulanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan anggota, pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera tidak dapat menyediakan barang yang dipesan anggota melainkan hanya berupa sejumlah dana yang diperlukan oleh anggota, dengan tambahan surat keterangan yang berisi anggota membelanjakan uang yang telah diterima sesuai akad yang disepakati. Dalam akad murabahah dengan tambahan surat keterangan dimana pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera

menganggap sebagai pengganti akad wakalah, adanya akad wakalah untuk memudahkan anggota dalam membeli barang kebutuhan yang diinginkannya dan karena yang akan mengambil barang dan berhubungan langsung dengan supplier adalah anggota, maka KSPPS menambahkan akad wakalah. Kemudian proses penandatanganan dan perjanjian akad tersebut disetujui dalam waktu yang bersamaan diawali dengan akad murabahah lalu akad wakalah dan setelah itu dana dapat dicairkan.

Kemudian setelah dana dicairkan oleh pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, anggota dapat membeli barang yang dibutuhkan langsung kepada supplier, semua barang yang dibeli atas nama anggota dan tidak ada campur tangan dari KSPPS lagi. Setelah itu anggota mencicil angsuran yang telah ditentukan tiap bulan. Untuk bukti pembelian barang juga tidak ada laporan dari anggota atau KSPPS tidak menanyakan kembali mengenai rincian barang yang dibeli.

Mengenai hal tersebut menurut penulis, ditemukan kesalahan yaitu akad murabahah dan akad wakalah terjadi dalam satu waktu. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Jadi, disini akad wakalah harus dilaksanakan terlebih dahulu setelah nasabah (anggota) membeli barang-barangnya sebagai wakil dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS). Akad wakalah akan berakhir dibuktikan dengan adanya nota

pembelian/kwitansi bahwa anggota telah membeli barang sesuai akad untuk dan atas nama KSPPS, jadi secara prinsip KSPPS telah memiliki barang tersebut, kemudian dilanjutkan dengan akad murabahah.

Pembiayaan murabahah yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera ini juga telah menggugurkan salah satu rukun dalam jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Serta dalam akad wakalah juga tidak terpenuhi salah satu rukun nya, karena barang yang akan dibeli secara prinsip belum menjadi milik KSPPS. Pihak KSPPS tidak memiliki hubungan kerjasama dan kesepakatan dalam pembelian barang dengan supplier sehingga proses pembelian tidak dapat diwakilkan kepada anggota.

Selanjutnya dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam hal pengawasan berbasis moral pada aspek individu dan pengelola bisnis. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) belum menjalankan perannya, yaitu untuk meningkatkan kemampuan sumber daya insani terkait dengan pemahaman produk-produk yang ada di lembaga keuangan syari'ah, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) melalui direksi akan terus melakukan workshop dan pelatihan agar kemampuan para pengurus KSPPS semakin berkembang. Disini peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) hanya sekedar memberi saran saja, akan lebih baik jika Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) terjun langsung untuk memberi pengarahan dan binaan kepada pengurus dan pengelolaan KSPSS. Karena

salah satu bentuk tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) juga tentang pembinaan akhlak dan moral pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS).

Dari sekian banyak sistem pengawasan, yang paling mendasar menurut penulis terletak pada pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola KSPPS tersebut. Pengawasan berbasis moral pada individu ini akan mendorong para pelaku KSPPS memiliki basis moral yang positif. Sehingga menimbulkan motivasi pengawasan dari dalam dirinya sendiri meskipun tidak diawasi oleh orang lain atau suatu badan yang berwenang, mereka tidak akan melakukan kesalahan atau penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syari'ah.

Oleh karena itu semua insan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) sebagai pelaku bisnis syari'ah harus didorong agar memiliki aqidah yang kuat. untuk mencapai kondisi tersebut, manajemen dan budaya kerja di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) harus mampu mendukung terciptanya spiritualitas pada masing-masing individu.

Dalam hukum Islam, mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syari'ah telah diatur dalam Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah. Adapun tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yaitu<sup>100</sup> :

---

<sup>100</sup> Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah.

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah
  - a) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.
  - b) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Akan tetapi dalam praktiknya, mengenai tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera sudah menjalankan tugasnya namun belum optimal. Dikarenakan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) secara struktural memang ada, namun secara fungsional belum maksimal. Salah satu faktornya kesibukan dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) maka pengawasan pada kegiatan operasional tidak bisa secara berkala, terkadang aktif terkadang juga pasif. serta dalam kegiatan pembiayaan salah satunya dengan akad murabahah yang masih ditemukan kesalahan.

Mengenai fungsi Dewan Pengawas Syari'ah, dalam hal ini telah sesuai dengan keputusan DSN-MUI tersebut, karena Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) telah memberikan usul untuk perkembangan KSPPS yang diawasinya kepada pengurus KSPPS. Karena bila tanpa usulan dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), maka produk yang ada di KSPPS tidak dapat diberlakukan.

Fatwa-fatwa DSN-MUI merupakan produk dari para ulama yang mempresentasikan perannya dalam menerapkan dan memelihara prinsip

syari'ah. Khususnya dalam bidang ekonomi di lembaga keuangan syari'ah. Selain dijadikan pedoman oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), fatwa DSN-MUI juga dikembangkan melalui masukan yang diberikan dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) berdasarkan temuan dilapangan. Setelah itu akan memunculkan fatwa baru yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan :

1. Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam fungsi pengawasan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera yaitu, dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) kurang aktif karena secara struktural Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) memang ada, tetapi secara fungsional belum berjalan dengan baik seperti kehadirannya belum rutin, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) tidak melakukan review kembali terhadap setiap akad. Jadi berdasarkan peraturan yang ada peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) masih belum optimal.
2. Kesesuaian peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam fungsi pengawasan menurut hukum Islam, fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Semarang masih belum berjalan dengan baik dan belum sesuai. Hal ini merujuk pada Keputusan DSN-MUI No 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah. Ternyata ditemukan ketidaksesuaian dalam peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai pengawas syari'ah. Seperti lemahnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS),



sehingga masih ditemukan akad yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

## **B. Saran**

1. Untuk menjamin dipraktikannya sistem syari'ah secara konsisten di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS). Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang, sebagai pihak yang mengawasi dan bertanggungjawab atas pemenuhan prinsip syari'ah yang diberlakukan, hendaknya peranan dan kinerja Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dapat ditingkatkan lagi secara optimal dan berkala. Sehingga tidak ditemukan lagi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam kegiatan operasional dalam lembaga keuangan syari'ah tersebut.
2. Mengingat pentingnya peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di lembaga keuangan syari'ah, khususnya dalam pengawasan akad-akad agar sesuai fatwa DSN-MUI. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi komunikasi antara Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Nusa Ummat Sejahtera Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq, 2006, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Alhusain, Achmad Sani, 2018, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amalia, Euis, 2016, *Keuangan Mikro Syari'ah*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakata: Gema Insani.
- Arofah, Anik, 2008, *Peran Dewan Syari'ah terhadap pengawasan aspek syari'ah di BMT Safinah Klaten*, Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Azis, Fadhilah, 2017, *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Mengawasi Bank Syari'ah (Studi kassus bank sulselbar syari'ah ratulangi makassar*, skripsi UIN-Alauddin Makassar.
- Djuwani, Dimyaudiin, 2002, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Marah, 2011, *Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam: Islam Futura*, Vol X, No 2.
- Haris, Herdiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasanah, Neneng Nur, 2017, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Farid, 2016, *Mahkamah, Alternative Sistem pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance*, Vol.2, No. 1, Desember.
- Insani, Riswanda Fajar, 2017, *Analisis Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah di BMT Ramadan Salatiga*, Skripsi-IAINSalatiga.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Keadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta Kencana.
- Mardian, Sepky, 2015, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Tingkat Kepatuhan Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Vol 3 No. 1.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada media: 2006.

Masliana, 2011, *Peran Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari'ah (Studi pada Bank BRI Syari'ah)*, Skripsi UIN-Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Mushafy, Abdullah Alvin, 2015, *Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Moloeng, Lexy J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, 2018, *Audit & Pengawasan Syari'ah Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.

Mujahidin, Akhmad, 2007, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nainggolan, Basaria, 2016, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Nopriansyah, Walidi, 2019, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam perspektif Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Noviyanti, Ririn, 2017, *Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian*, Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol.2, No 1, Maret.

Prastyaningsih, Ika, Syamsuri, 2018, *Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Implementasi Syari'ah Compliance Perbankan Syari'ah*, Al-Mustahfa, Vo. 3, No 1.

Priyadi, Unggul, 2018, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.

Romly, 2015, *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, Sleman: CV Budi Utama.

Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kaulitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sholihan, Ahmad Ifham, 2010, *Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Soemitra, Andri, M.A., 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tuwu, Alimuddin, 1993, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

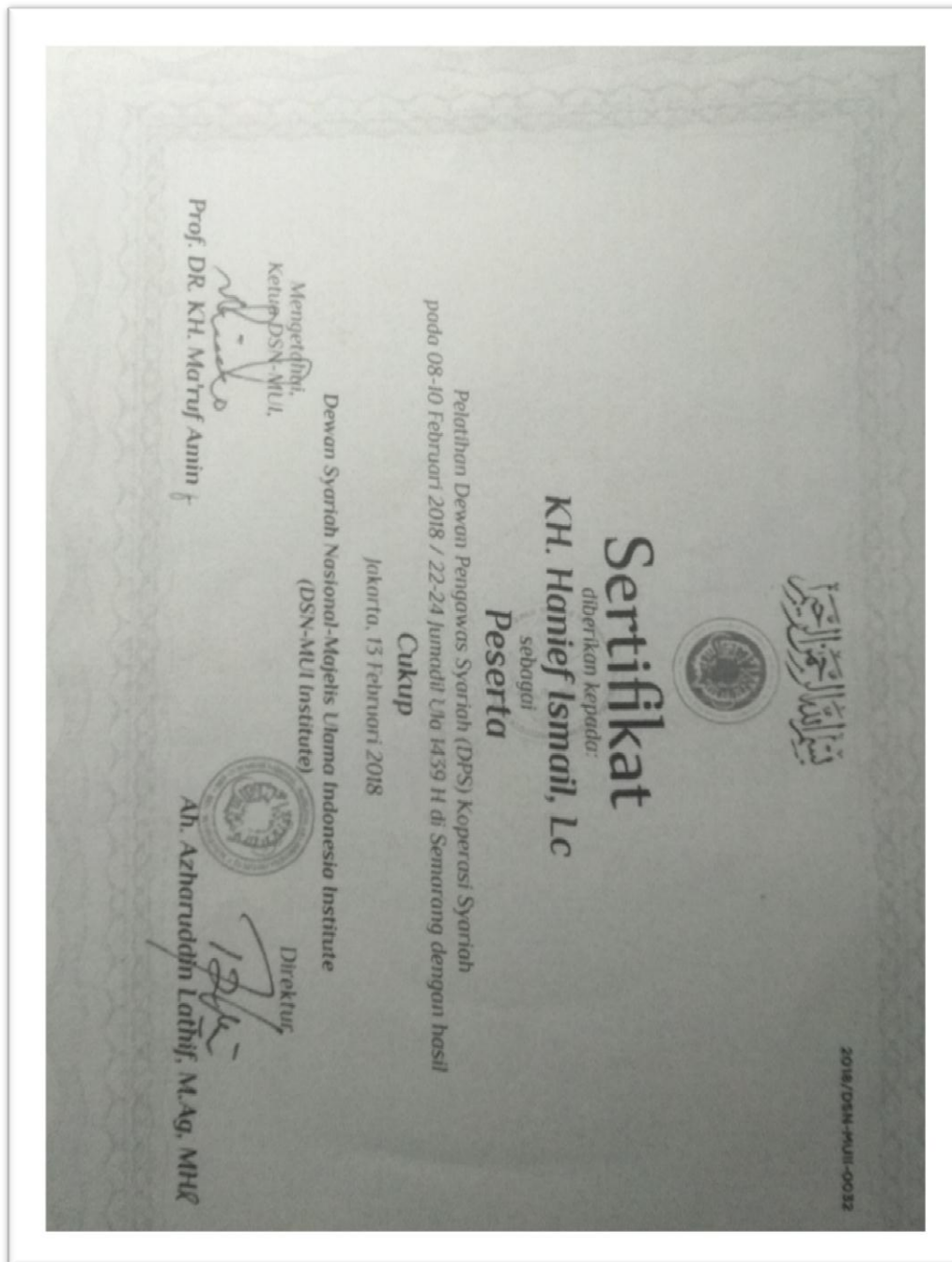
Widiyanto, 2016, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: Rajawali Press.

Yunus, Jamal Lulail, 2009, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, Malang: UIN Malang Press.

Zulfaqar, Bin Mamat, 2010, *Institusi Hisbah dan Penerapannya Dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam*, Jurnal Muamalat, Vol.III.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Sertifikat DSN-MUI



## 2. Wawancara Anggota DPS



### 3. Surat Keterangan



**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**  
**BMT 'NU SUKSES'**  
**KOTA SEMARANG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :...../...../...../...../.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Memberi tugas kepada :

Nama : .....

Alamat : .....

Bertindak sebagai mudharib pengguna jasa pembiayaan murabahah BMT NUS. Untuk membelanjakan uang yang telah diterima sesuai dengan akad yang disepakati.

Demikian surat kuasa ini kami berikan. Mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamitthariiq

Wassalamu'alaikum wr. wb.

.....

Yang menerima kuasa

Yang memberi kuasa

(.....)

Mudharib

(.....)

Manager

#### 4. Brosur Produk Pembiayaan KSPPS

PEMBIAYAAN SYARI'AH

( MUROBAHAH )

Yaitu pembiayaan dengan pola jual beli, KSPPS NUS membeli barang yang dibutuhkan anggota, margin ditentukan diawal dan disepakati oleh kedua belah pihak.


(MUDHOROBAN = INVESTASI)

**Biayai Usaha Anda Bersama kami**  
Dengan syarat-syarat:

1. Mengisi formulir permohonan Anggota dan Pembiayaan (Form tersedia).
2. Foto copy KTP suami dan istri atau wali.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
4. Foto copy jaminan (warkah BMT, BPKB disertai STNK, Sertifikat tanah disertai SPPT). Bila barang jaminan atas nama orang lain harus disertai surat kuasa dari pemegang hak.
5. Bila pemohon menggunakan penjamin baik lembaga maupun perorangan harus tertulis dan bermatre cukup.
6. Foto copy legalitas (bagi badan usaha).
7. Menjadi anggota mitra usaha.
8. Membuka rekening setoran pokok.
9. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.
10. Bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.

Untuk bisa menikmati produk KSPPS NUS  
ayo menjadi anggota

*Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Ummat yang Mandiri dengan Landasan Syari'ah*



**WADI'AH (SIMPANAN)**  
&  
**PEMBIAYAAN SYARI'AH**

**Layanan lain :**

- \* Transfer Antar Bank
- \* Pembiayaan Haji/Umroh
- \* Simpanan Haji/Umroh

**KSPPS**  
**'NU SEJAHTERA'**

Badan Hukum Nasional: 178/Lap-PAD X 2014

**KANTOR PUSAT SEMARANG**  
Jl. Raya Semarang Kendal KM 15 No. 89 Mangkang Semarang  
Telp. (024) 8660212 Fax. (024) 8660323  
Email: bmt\_nus@yahoo.co.id





## PRODUK SIMPANAN / PEMBIAYAAN

### 1. WADI'AH

(dengan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah)

Simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Berdasarkan tahun lalu bonus setara dengan 2,4 % /tahun. Wadi'ah bagi lembaga setara 3 %/tahun.

Syarat dan ketentuan

- \* Setoran awal atau saldo minimal Rp. 10.000,-
- \* Pengambilan sewaktu-waktu

### 2. SIMPANAN PENDIDIKAN

(dengan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah)

Simpanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa sekolah. Bonus setara dengan 3 %/tahun.

### 3. SIMPANAN QURBAN/AQIQOH

(dengan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah)

Simpanan sukarela yang dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah Qurban. Bonus setara dengan 2,4 %/tahun.

Syarat dan ketentuan :

- \* Setoran awal Rp. 100.000,-
- \* Pengambilan menjelang 'Idul Qurban apabila telah cukup untuk membeli hewan Qurban yang direncanakan.

### 4. SIMPANAN UMROH

(dengan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah)

Simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah Umroh. Bonus setara dengan 2,4 %/tahun.

Syarat dan ketentuan :

- \* Setoran minimal Rp. 100.000,-
- \* Pengambilan setelah cukup untuk biaya umroh.
- \* Fasilitas bagi jamaah berupa Tas Tenteng, Bimbingan Manasik dan souvenir. Jama'ah bisa mengikuti bimbingan umroh dengan biro perjalanan manapun termasuk KBIH NU.

### 5. SIMPANAN PELUNASAN HAJI

(dengan prinsip Mudharabah)

Simpanan bagi Calon Haji yang sudah mendapatkan Porsi.

Syarat dan ketentuan :

- \* Setoran minimal Rp. 1.000.000,-/Kelipatannya.
- \* Nisbah menyesuaikan simka umum.
- \* Bagi hasil dipergunakan untuk biaya manasik di KBIH pilihannya. Bila sisa lebih dikembalikan kepada calon haji, bila kurang calon haji dimohon tambahan.
- \* Proses penyetoran pelunasan dibantu oleh KSPPS NUS.
- \* Syarat-syarat mengisi formulir dilengkapi FC, KTP, BPKH buku tabungan Bank.
- \* Dana simpanan tidak bisa diambil kecuali untuk pelunasan haji.

### 6. SIMPANAN PENSIUNAN

(dengan prinsip Mudharabah)

Ketentuan

- \* Atas nama perorangan.
- \* Pembayaran setiap bulan sesuai akad.
- \* Apabila terjadi keterlambatan otomatis dianggap berhenti dan tidak mendapatkan bagi hasil.
- \* Lama jangka waktu 5 dan 10 tahun.
- \* Bagi hasil menyesuaikan masa jangka waktu.
- \* Minimal setoran mulai Rp. 50.000,-/bulan

### 7. SIMPANAN BERJANGKA

(dengan prinsip Mudharabah)

Nisbah bagi hasil antara Shohibul Mal dengan Mudhorib = 60:40.

1. Jangka Waktu 1 bulan, Bagi hasil setara dengan 0,3%/bulan.
2. Jangka Waktu 3 bulan, Bagi hasil setara dengan 0,5%/bulan/1,5%/3 bulan.
3. Jangka Waktu 6 bulan, Bagi hasil setara dengan 0,7%/bulan/4,2%/6 bulan.
4. Jangka Waktu 12 bulan, Bagi hasil setara dengan 1%/bulan/12%/tahun.

Syarat dan Ketentuan :

- \* Setoran minimal Rp. 1.000.000; dan atau kelipatannya
- \* Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo dikenakan penalti setara dengan 5%
- \* Bagi hasil bisa diambil setiap bulan dan dibukakan rekening wadi'ah dan diterbitkan buku bukti setor berupa warkah.
- \* Zakat 2,5%
- \* Zakat dipungut oleh LAZISNU dari bagi hasil yang tersedia atas dasar persetujuan dari Shohibul Mal kepada LAZISNU.

### 8. PEMBIAYAAN HAJI/UMROH

(dengan prinsip Murobahah)

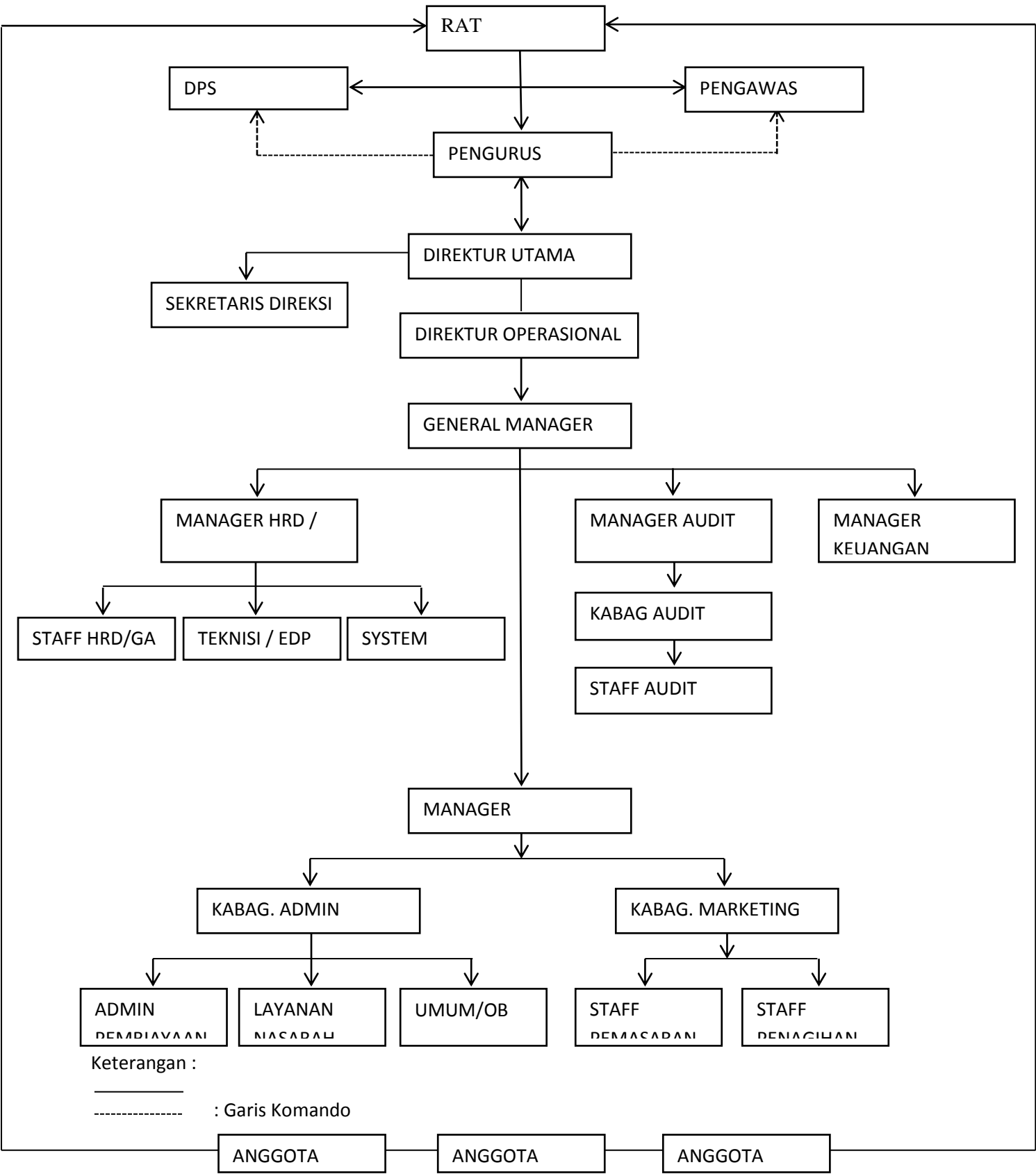
Syarat dan ketentuan :

- \* Plafon sesuai kebutuhan
- \* Margin/keuntungan 16,8 % / tahun = 1,4 % / bulan.
- \* Jangka waktu maksimal 4 tahun.
- \* Jaminan sertifikat tanah dengan menggunakan pengikatan APHT. Biaya ditentukan Notaris.
- \* Jaminan BPKB Mobil dengan pengikatan fidusia biaya ditentukan Notaris.
- \* Cara angsuran = bulanan
- \* Besarnya angsuran = plafon dibagi jangka waktu + margin/keuntungan = angsuran perbulan.
- \* Biaya administrasi = sesuai jangka waktu.
- \* Biaya dibayar dimuka termasuk biaya materai 2 lembar

- Syarat dan ketentuan berlaku
- Produk sewaktu-waktu berubah

STRUKTUR ORGANISASI DAN DESKRIPSI PEKERJAAN

STRUKTUR ORGANISASI  
KSPPS NUSA UMMAT SEJAHTERA



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Bellia Sofiana Najwa

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 14 Mei 1997

Nama Orang Tua : Drs. Shofi'i (ayah) dan Nur Astuti (Ibu)

Alamat Asal : JL. Anggraini 1 No 10 Semarang

Riwayat Pendidikan :

2003-2009 : SD Nurul Islam Semarang

2009-2012 : SMP Nurul Islam Semarang

2012-2015 : SMA Negeri 6 Semarang

2015-2020 : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang